

DAFTAR PUSTAKA

- Baterialni , Rostika dan N. A. Rumiasih dan 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Atas Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Penghasilan (PPh) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*
- Darussalam, Danny Septriadi, Khisi Armaya Dhora, dan Erika (2021). *Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak*. Penerbit: DDTC
- Darussalam, Danny Septriadi, dan Khisi Armaya Dhora (2020). *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Penerbit: DDTC
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2).
- Istiqomah ,2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak. *Jurnal Nominal / Volume Vi Nomor 1 / Tahun 2017*.
- Istiqomah,2016. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Listiyowati, L., Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41-59.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi

Pangkey, M. M., Sondakh, J. J., & Tirayoh, V. Z. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Tax Amnesty Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).

Riyanto & Nyoman Asri Hapsari P.M.2021. Kebijakan Fiskal Dalam Pandemi Covid-19: Dampak dan Tantangan Penerimaan Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Dua. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia. Volume 2 No.2. April 2021*

Rumiasih, N. A., & Baterialni, R. (2013). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Atas Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Penghasilan (PPH) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 8(2).

Siti, Resmi. (2011). *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Valianti, R. M. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Lahat. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 14(1).

Yogatama, A., & Meiranto, W. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak DJP No Kep-156/PJ/2020 Tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019

Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2020 dan PMK 23/PMK03/2020 Tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/Pmk.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/Pmk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19)

www.bps.go.id

www.kemenkeu.go.id

